BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Perancangan Sistem Informasi Akuntansi Kas

2.1.1 Perancangan

Definisi menurut John Burch dan Gary Grudnitski yang telah terjemahkan oleh Jogiyanto (2005:196) dalam bukunya yang berjudul *Analisis dan Desain Sistem Informasi* menyebutkan bahwa: "desain sistem dapat didefinisikan sebagai penggambaran, perencanaan, dan pembuatan sketsa atau pengaturan dari beberapa elemen yang terpisah dari satu kesatuan yang utuh dan berfungsi".

Definisi menurut Krismiaji (2005:144) dalam buku *Sistem Informasi Akuntansi* menyebutkan bahwa:

> Perancangan terdiri dari perancangan logis adalah melengkapi *eksternal level schema* dan menterjemahkan persyaratan data para pemakai dan program aplikasi ke dalam *conceptual level schema* sedangkan perancangan fisik (*physical design*) adalah mengubah hasil rancangan konsep ke dalam struktur penyimpanan fisik.

Berdasarkan dari kedua definisi di atas, maka penulis dapat simpulkan bahwa perancangan adalah suatu konsep mendesain atau mengubah hasil rancangan ke dalam struktur konsep yang baru.

2.1.2 Sistem

Definisi sistem menurut dari Jogiyanto (2005:2) dalam buku yang berjudul *Analisis dan Desain Sistem Informasi* menjelaskan bahwa: "sistem adalah kumpulan dari elemen-elemen yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan

tujuan tertentu".

Definisi sistem menurut West Churchman yang diterjemahkan oleh Krismiaji (2005:1) dalam buku yang berjudul *Sistem Informasi Akuntansi* mendefinisikan bahwa: "sistem dapat didefinisikan sebagai serangkaian komponen yang dikoordinasikan untuk mencapai serangkaian tujuan".

Berdasarkan dari kedua definisi di atas, maka penulis dapat simpulkan bahwa sistem adalah sekumpulan komponen-komponen yang berinteraksi satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan.

2.1.3 Informasi

Menurut Krismiaji (2005:15) dalam bukunya yang berjudul *Sistem Informasi Akuntansi* menjelaskan bahwa: "informasi adalah data yang telah diorganisasi dan telah memiliki kegunaan dan manfaat".

Definisi informasi menurut Marshall B. Romney dan Paul John Steinbart (2004:11) di dalam buku *Accounting Information Systems* mendefinisikan bahwa: "informasi adalah data yang telah diatur dan diproses untuk memberikan arti".

Berdasarkan dari kedua definisi di atas, maka penulis simpulkan bahwa Informasi adalah suatu data yang telah diorganisasi dan telah diatur untuk memberikan arti dan manfaat.

2.1.4 Sistem Informasi

Definisi menurut Jogiyanto (2005:11) dalam buku yang berjudul *Analisis dan Desain Sistem Informasi*, menyebutkan bahwa:

> Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan.

Definisi sistem informasi menurut Al-Bahra bin Ladjamudin (2005:13) dalam buku yang berjudul *Analisis dan Desain Sistem Informasi* mendefinisikan bahwa: ”sistem informasi adalah sekumpulan prosedur organisasi yang pada saat dilaksanakan akan memberikan informasi bagi pengambil keputusan dan atau untuk mengendalikan organisasi”.

Berdasarkan dari kedua definisi di atas, maka penulis simpulkan bahwa sistem informasi merupakan sistem suatu organisasi yang akan memberikan informasi untuk mengendalikan organisasi dan kegiatan strategi dari suatu organisasi.

2.1.5 Akuntansi

Definisi akuntansi menurut Deddi Nordiawan, dkk (2008:1) dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Pemerintahan* mengatakan bahwa: “akuntansi adalah proses mengenali, mengukur, dan mengkomunikasikan informasi ekonomi untuk memperoleh pertimbangan dan keputusan yang tepat oleh pemakai informasi yang bersangkutan”.

Definisi menurut Soemarso (2004:3) dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Suatu Pengantar* yang diambil dari definisi *American Accounting Association* adalah sebagai berikut: “akuntansi adalah proses mengidentifikasikan, mengukur dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut”.

Berdasarkan kedua definisi di atas, penulis dapat simpulkan bahwa akuntansi adalah proses untuk mengukur informasi ekonomi untuk dapat memperoleh keputusan bagi pengguna informasi tersebut.

2.1.5.1 Metode Pencatatan Akuntansi

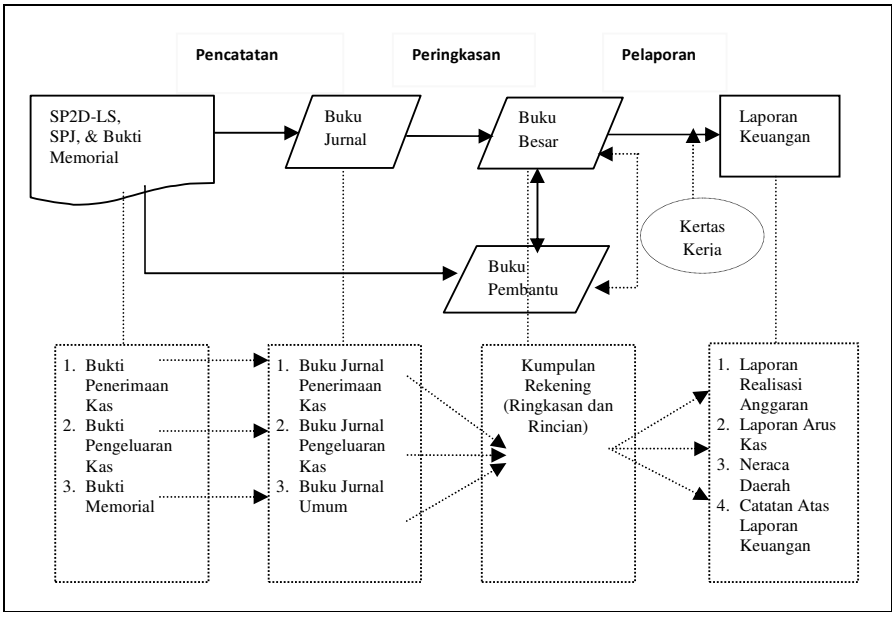
Menurut Deddi Nordiawan, dkk (2008:141) dalam bukunya *Akuntansi Pemerintahan* metode pencatatan akuntansi dibagi 2 yaitu: "(a). Basis Kas mengakui transaksi pada saat kas diterima atau dibayarkan, (b). Basis Akrual mengakui transaksi pada saat terjadinya dan mempunyai fokus pengukuran pada semua sumber daya yang dimiliki".

2.1.5.2 Proses Akuntansi

Menurut Abdul Halim (2007:52) dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah* menjelaskan tentang proses akuntansi seperti di bawah ini:

> Sistem akuntansi menurut Kepmendagri No 29 Tahun 2009 adalah sistem akuntansi yang meliputi proses pencatatan, penggolongan, penafsiran, peringkasan transaksi atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangannya dalam rangka pelaksanaan APBD, dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum.

Dan untuk proses akuntansi apabila digambarkan akan tampak seperti di bawah ini:

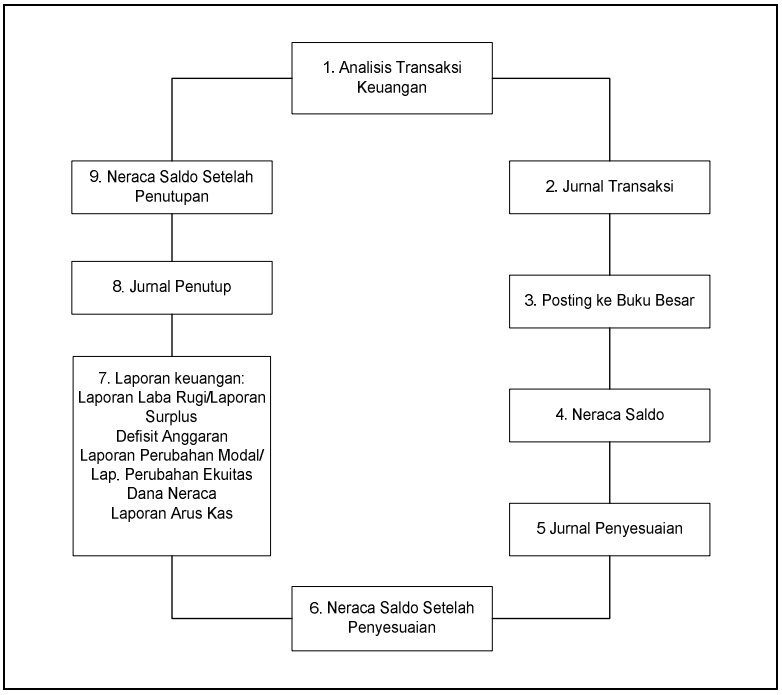


Gambar 2.1 Proses Akuntansi (2007:52)

2.1.5.3 Siklus Akuntansi

Pengertian siklus akuntansi menurut Indra Bastian (2007:76) dalam bukunya yang berjudul *Sistem Akuntansi Sektor Publik,* mengatakan bahwa: "Siklus akuntansi merupakan sistematika pencatatan transaksi keuangan, peringkasannya dan pelaporan keuangan." Menurut Abdul Halim (2007:43) dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*, mengatakan bahwa: "Siklus akuntansi adalah tahap-tahap yang ada dalam sistem akuntansi."

Apabila digambarkan, siklus akuntansi akan berbentuk sebagai berikut:



Gambar 2.2 Siklus Akuntansi (2007:43)

A. Jurnal Umum

Menurut Soemarso (2004:94) dalam bukunya yang berjudul *Akuntansi Suatu Pengantar*, menyebutkan bahwa: "ayat jurnal dapat dicatat dengan cara sederhana, namun pada umumnya terdapat formulir khusus guna pencatatan tadi. Formulir ini disebut buku harian atau jurnal (*journal*)".

Definisi jurnal menurut Mulyadi (2001:4) dalam bukunya yang berjudul *Sistem Akuntansi*, menyebutkan bahwa: "jurnal adalah catatan akuntansi permanen yang pertama digunakan untuk mencatat transaksi keuangan perusahaan".

Berdasarkan dari kedua definisi di atas, maka penulis simpulkan bahwa jurnal adalah catatan transaksi keuangan yang terjadi yang berisi ayat jurnal.

Bentuk dari jurnal umum menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (2008:716) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jurnal Umum

KABUPATEN/KOTA
JURNAL UMUM
Per Januari n - Desember n

(In Rp)

Nama SKPD :

Tanggal	Nomor Bukti/Dokumen	Kode Rekening	Uraian	Jumlah	
				Debit	Kredit
xxx	STS/xxx/xx/xxxx	1.20.1.20.08.18.00.00.1.1 1.20.1.20.08.18.00.00.4.1.2.01.03	Kas Kecamatan Retribusi KTP & Akte Catatan Sipil	Rp xx -	- Rpxx
xxx	STS/xxx/xx/xxxx	1.20.1.20.08.18.00.00.1.1 1.20.1.20.08.18.00.00.4.1.2.03.01	Kas Kecamatan Retribusi IMB	Rpxx -	- Rpxx
xxx	BKB/xxx/xx/xxxx	1.20.1.20.08.18.00.00.1.2 1.20.1.20.08.18.00.00.1.1	Kas Bank Kas Kecamatan	Rpxx -	- Rpxx
xxx	TRS/xxx/xx/xxxx	1.20.1.20.08.18.00.00.1.2 1.20.1.20.08.18.00.00.4.1.2.01.06	Kas Bank Retribusi Pasar	Rpxx -	- Rpxx
xxx	PP/xxx/xx/xxxx	1.20.1.20.08.18.00.00.1.2 1.20.1.20.08.18.00.00.6.1.6.02.01	Kas Bank Pendapatan Pemerintah	Rpxx -	- Rpxx
xxx	BKT/xxx/xx/xxxx	1.20.1.20.08.18.00.00.5.2.2.01.01 1.20.1.20.08.18.00.00.1.2	Perlengkapan Kas Bank	Rpxx -	- Rpxx
xxx	BKT/xxx/xx/xxxx	1.20.1.20.08.18.00.00.5.2.2.03.02 1.20.1.20.08.18.00.00.1.2	Belanja Air Kas Bank	Rpxx -	- Rpxx
xxx	BKT/xxx/xx/xxxx	1.20.1.20.08.18.00.00.5.2.2.03.03 1.20.1.20.08.18.00.00.1.2	Belanja Listrik Kas Bank	Rpxx -	- Rpxx
xxx	BKT/xxx/xx/xxxx	1.20.1.20.08.18.00.00.5.2.2.03.01 1.20.1.20.08.18.00.00.1.2	Belanja Telepon Kas Bank	Rpxx -	- Rpxx
xxx	RG/xxx/xx/xxxx	1.20.1.20.08.18.00.00.5.1.1 1.20.1.20.08.18.00.00.1.2	Belanja Gaji Kas Bank	Rpxx -	- Rpxx
			JUMLAH	**Rpxx**	**Rpxx**

B. Buku Besar Umum

Definisi menurut Mulyadi (2001:121) dalam bukunya yang berjudul *Sistem Akuntansi,* menjelaskan bahwa: "buku besar merupakan kumpulan rekening-rekening yang digunakan untuk menyotasi dan meringkas informasi yang telah dicatat dalam jurnal".

Definisi menurut Soemarso (2004:79) dalam bukunya berjudul *Akuntansi Suatu Pengantar,* menjelaskan bahwa: "buku besar (*ledger)* kumpulan dari akun-akun yang saling berhubungan dan yang merupakan suatu kesatuan tersendiri".

Berikut merupakan bentuk buku besar umum menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (2008:707) adalah:

Tabel 2.2 Buku Besar Umum untuk Kas Kecamatan

Nama SKPD : Kabupaten/Kota
Nama Rekening : Kas Kecamatan
Kode Rekening : 1.20.1.20.08.18.00.00.1.1

(In Rp)

Tanggal	Uraian	Kode Rekening	Jumlah		D/C	Saldo
			Debit	Kredit		
xxx	Retribusi KTP & Akte Catatan Sipil	1.20.1.20.08.18.00.00.4.1.2.01.03	Rpxx	-	D	Rpxx
xxx	Retribusi IMB	1.20.1.20.08.18.00.00.4.1.2.03.01	Rpxx	-	D	Rpxx
xxx	Kas Bank	1.20.1.20.08.18.00.00.1.2	-	Rpxx	C	Rpxx

Tabel 2.3 Buku Besar Umum untuk Kas Bank

Nama SKPD : Kabupaten/Kota
Nama Rekening : Kas Bank
Kode Rekening : 1.20.1.20.08.18.00.00.1.2

(In Rp)

Tanggal	Uraian	Kode Rekening	Jumlah		D/C	Saldo
			Debit	Kredit		
xxx	Kas Kecamatan	1.20.1.20.08.18.00.00.1.1	Rpxx	-	D	Rpxx
xxx	Retribusi Pasar	1.20.1.20.08.18.00.00.4.1.2.01.06	Rpxx	-	D	Rpxx
xxx	Pendapatan Pemerintah	1.20.1.20.08.18.00.00.6.1.6.02.01	Rpxx	-	D	Rpxx
xxx	Perlengkapan	1.20.1.20.08.18.00.00.5.2.2.01.01	-	Rpxx	C	Rpxx
xxx	Belanja Air	1.20.1.20.08.18.00.00.5.2.2.03.02	-	Rpxx	C	Rpxx
xxx	Belanja Listrik	1.20.1.20.08.18.00.00.5.2.2.03.03	-	Rpxx	C	Rpxx
xxx	Belanja Telepon	1.20.1.20.08.18.00.00.5.2.2.03.01	-	Rpxx	C	Rpxx
xxx	Belanja Gaji	1.20.1.20.08.18.00.00.5.1.1	-	Rpxx	C	Rpxx

Tabel 2.4 Buku Besar Umum untuk Retribusi KTP & Akte Catatan Sipil

Nama SKPD : Kabupaten/Kota
Nama Rekening : Retribusi KTP & Akte Catatan Sipil
Kode Rekening : 1.20.1.20.08.18.00.00.4.1.2.01.03

(In Rp)

Tanggal	Uraian	Kode Rekening	Jumlah		D/C	Saldo
			Debit	Kredit		
xxx	Kas Kecamatan	1.20.1.20.08.18.00.00.1.1	-	Rpxx	C	Rpxx

Tabel 2.5 Buku Besar Umum untuk Retribusi IMB

Nama SKPD : Kabupaten/Kota
Nama Rekening : Retribusi IMB
Kode Rekening : 1.20.1.20.08.18.00.00.4.1.2.03.01

(In Rp)

Tanggal	Uraian	Kode Rekening	Jumlah		D/C	Saldo
			Debit	Kredit		
xxx	Kas Kecamatan	1.20.1.20.08.18.00.00.1.1	-	Rpxx	C	Rpxx

Tabel 2.6 Buku Besar Umum untuk Retribusi Pasar

Nama SKPD : Kabupaten/Kota
Nama Rekening : Retribusi Pasar
Kode Rekening : 1.20.1.20.08.18.00.00.4.1.2.01.06

(In Rp)

Tanggal	Uraian	Kode Rekening	Jumlah		D/C	Saldo
			Debit	Kredit		
xxx	Kas Bank	1.20.1.20.08.18.00.00.1.2	-	Rpxx	C	Rpxx

Tabel 2.7 Buku Besar Umum untuk Pendapatan Pemerintah

Nama SKPD : Kabupaten/Kota
Nama Rekening : Pendapatan Pemerintah
Kode Rekening : 1.20.1.20.08.18.00.00.6.1.6.02.01

(In Rp)

Tanggal	Uraian	Kode Rekening	Jumlah		D/C	Saldo
			Debit	Kredit		
xxx	Kas Bank	1.20.1.20.08.18.00.00.1.2	-	Rpxx	C	Rpxx

Tabel 2.8 Buku Besar Umum untuk Perlengkapan

Nama SKPD : Kabupaten/Kota
Nama Rekening : Perlengkapan
Kode Rekening : 1.20.1.20.08.18.00.00.5.2.2.01.01

(In Rp)

Tanggal	Uraian	Kode Rekening	Jumlah		D/C	Saldo
			Debit	Kredit		
xxx	Kas Bank	1.20.1.20.08.18.00.00.1.2	Rpxx	-	D	Rpxx

Tabel 2.9 Buku Besar Umum untuk Belanja Air

Nama SKPD : Kecamatan Baleendah
Nama Rekening : Belanja Air
Kode Rekening : 1.20.1.20.08.18.00.00.5.2.2.03.02

(In Rp)

Tanggal	Uraian	Kode Rekening	Jumlah		D/C	Saldo
			Debit	Kredit		
xxx	Kas Bank	1.20.1.20.08.18.00.00.1.2	Rpxx	-	D	Rpxx

Tabel 2.10 Buku Besar Umum untuk Belanja Listrik

Nama SKPD : Kabupaten/Kota
Nama Rekening :Belanja Listrik
Kode Rekening : 1.20.1.20.08.18.00.00.5.2.2.03.03

(In Rp)

Tanggal	Uraian	Kode Rekening	Jumlah		D/C	Saldo
			Debit	Kredit		
xxx	Kas Bank	1.20.1.20.08.18.00.00.1.2	Rpxx	-	D	Rpxx

Tabel 2.11 Buku Besar Umum untuk Belanja Telepon

Nama SKPD : Kabupaten/Kota
Nama Rekening : Belanja Telepon
Kode Rekening : 1.20.1.20.08.18.00.00.5.2.2.03.01

(In Rp)

Tanggal	Uraian	Kode Rekening	Jumlah		D/C	Saldo
			Debit	Kredit		
xxx	Kas Bank	1.20.1.20.08.18.00.00.1.2	Rpxx	-	D	Rpxx

Tabel 2.12 Buku Besar Umum untuk Belanja Gaji

Nama SKPD : Kabupaten/Kota
Nama Rekening : Belanja Gaji
Kode Rekening : 1.20.1.20.08.18.00.00.5.1.1

(In Rp)

Tanggal	Uraian	Kode Rekening	Jumlah		D/C	Saldo
			Debit	Kredit		
xxx	Kas Bank	1.20.1.20.08.18.00.00.1.2	Rpxx	-	D	Rpxx

C. Laporan Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran

Menurut definisi dari Deddi Nordiawan, dkk (2008:159) yang dikutip dari PP 24 Tahun 2005 dalam bukunya *Akuntansi Pemerintahan,* menjelaskan bahwa: "laporan realisasi anggaran adalah laporan keuangan yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya dalam satu periode pelaporan".

Menurut definisi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (2008:695), menjelaskan bahwa:

> Laporan realisasi anggaran pemerintahan daerah merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintahan daerah, yang mengggambarkan perbandingan antara realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaporan.

Bentuk laporan realisasi anggaran menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (2008:1143) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.13 Laporan Realisasi Anggaran

KABUPATEN / KOTA
SKPD
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
Untuk Tahun yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember Tahun n

(In Rp)

No. Urut	Uraian	Anggaran Setelah Perubahan	Realisasi	Lebih / (Kurang)
1	2	3	4	5
1	**PENDAPATAN**			
1.1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**			
1.1.1	Pendapatan Retribusi Daerah	Rpxx	Rpxx	Rpxx
1.1.2	Pendapatan dari Pemerintah	Rpxx	Rpxx	Rpxx
	JUMLAH PENDAPATAN	Rpxx	Rpxx	Rpxx
2	**BELANJA**			
2.1	**BELANJA OPERASI**			
2.1.1	Belanja Pegawai	Rpxx	Rpxx	Rpxx
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	Rpxx	Rpxx	Rpxx
2.2	**BELANJA MODAL**			
2.2.1	Belanja Tanah	Rpxx	Rpxx	Rpxx
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin	Rpxx	Rpxx	Rpxx
2.2.3	Belanja Aset Tetap Lainnya	Rpxx	Rpxx	Rpxx
	JUMLAH BELANJA	Rpxx	Rpxx	Rpxx
	SURPLUS / (DEFISIT)	**Rpxx**	**Rpxx**	**Rpxx**
3	**PEMBIAYAAN**			
3.1	**Penerimaan Daerah**			
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rpxx	Rpxx	Rpxx
3.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	Rpxx	Rpxx	Rpxx
	Jumlah	Rpxx	Rpxx	Rpxx
3.2	**Pengeluaran Daerah**			
3.2.1	Pemberian Pinjaman Daerah	Rpxx	Rpxx	Rpxx
3.2.2	Penyertaan Modal	Rpxx	Rpxx	Rpxx
	JUMLAH PEMBIAYAAN	Rpxx	Rpxx	Rpxx
3.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Daerah (SILPA)**	**Rpxx**	**Rpxx**	**Rpxx**

2. Neraca

Definisi menurut Deddi Nordiawan, dkk (2008:153) dalam bukunya *Akuntansi Pemerintahan,* menjelaskan bahwa: "neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas akuntansi mengenai aset, kewajiban, dan modal pada tanggal tertentu".

Definisi menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (2008:695), menyebutkan bahwa: "neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan pemerintahan daerah mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu".